

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan sumber daya alam yang didukung oleh biodiversitas yang tinggi merupakan salah satu faktor penopang pesatnya perkembangan perekonomian Indonesia (World Bank, 2024). Namun karakteristik bentang alam tersebut juga menyebabkan Indonesia termasuk dalam negara yang rentan terhadap *climate-related disaster* (Ardiansyah *et al.*, 2021; Thomas & Lopez, 2015). Terlepas dari karakteristik bentang alam Indonesia, pola hidup masyarakat, alih fungsi lahan, serta pembangunan tanpa adanya pemetaan risiko bencana tetap menjadi faktor signifikan yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana di Indonesia (Ardiansyah *et al.*, 2021; Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025). Eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung secara terus menerus tanpa pengelolaan yang memadai dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem.

Hal ini tercermin dalam penyusutan tutupan hutan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama tiga dekade terakhir (1990–2024) sebesar 1,2 juta hektar dengan rata-rata penyusutan 36.305 hektar per tahun (Ramadhan *et al.*, 2025). Dalam klarifikasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 25-30 November 2025 di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh tidak hanya disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, tetapi diperparah oleh hilangnya sebagian besar area resapan air akibat aktivitas industri (detikFinance, 2025). Fenomena ini menunjukkan perlunya tindak lanjut

terintegrasi antara institusi dan pelaku industri untuk dapat menciptakan regulasi dan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, dan aspek sosial.

Sebagai institusi yang memegang peran strategis dalam pengawasan aktivitas keuangan di Indonesia (Hayati *et al.*, 2020), Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (2017) mendorong penerapan pembangunan berkelanjutan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Melalui kebijakan tersebut, OJK berupaya mengarahkan aktivitas pembiayaan agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial generasi mendatang. Arah kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 yang mengatur bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, termasuk kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan laporan yang disusun sebagai bentuk pengungkapan kepada publik, mengenai performa keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu entitas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Sedangkan berdasarkan *Global Reporting Initiative*, laporan keberlanjutan adalah praktik pelaporan dan pengungkapan perusahaan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, yang terdiri dari ukuran kinerja organisasi dalam mencapai tujuan usaha. Pelaporan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan menjaga akuntabilitas entitas di mata publik (Breliastiti, 2017).

Urgensi keterbukaan laporan keberlanjutan perusahaan timbul seiring meningkatnya tuntutan terhadap perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan publik bahwa perusahaan telah menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan (Nu *et al.*, 2025). Selain itu, perusahaan lintas sektor, termasuk keuangan, perdagangan, dan industri, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dampak lingkungan sebagai bagian dari mitigasi risiko kerugian akibat dampak perubahan iklim di Indonesia (Bahtera, 2023). Meskipun keterbukaan pelaporan keberlanjutan telah bersifat wajib dan dapat memberikan nilai tambah serta citra positif bagi perusahaan (Irwadi *et al.*, 2023) tingkat keterbukaan laporan keberlanjutan di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan siaran pers OJK pada 22 Januari 2025, tercatat bahwa hingga Desember 2024 baru 94% dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI atau 882 perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* untuk tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum & Violita (2023) terkait evaluasi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan pada PT Tembaga Mulia Semanan Tbk menunjukkan bahwa laporan yang dibuat telah memenuhi kriteria peraturan OJK, akan tetapi kualitas penyajian informasinya belum sepenuhnya memenuhi informasi minimum sebagaimana diatur dalam SEOJK No.16/SEOJK.04/2021. TBMS baru memenuhi 71% dari kerangka strategi keberlanjutan yang dikembangkan oleh Wardhani & Rahardian (2021) (Cahyaningrum & Violita, 2023). Pengungkapan laporan keberlanjutan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk belum sepenuhnya komprehensif, khususnya pada aspek integrasi strategis, pengukuran kinerja, dan evaluasi berkelanjutan.

Selain pengungkapan yang masih belum cukup komprehensif dan informatif, fenomena lain yang terjadi adalah timbulnya kecenderungan *overclaim* dalam strategi keberlanjutan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Aptasari *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa PT Matahari Department Store Tbk, mengklaim penggunaan kemasan ramah lingkungan dengan persentase relatif tinggi, padahal kemasan yang berbahan ramah lingkungan hanya sebanyak 0,6% dari total kemasan yang digunakan. Selain itu, komitmen PT Matahari Department Store Tbk dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk untuk mengurangi penggunaan listrik dan air juga berpotensi lebih didorong oleh pertimbangan efisiensi biaya dalam rangka peningkatan laba daripada berorientasi pada pelestarian lingkungan (Aptasari *et al.*, 2024).

PT Sona Topan Tourism Industry Tbk. mengklaim melakukan daur ulang limbah kertas menjadi *shopping bag* dan *seal bag*, tetapi tidak didukung bukti kuantitatif mengenai produk daur ulang yang dihasilkan (Aptasari *et al.*, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan belum selalu diikuti oleh kualitas dan kedalaman pengungkapan yang memadai, sehingga mempertegas adanya variasi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan antarperusahaan (Tariq, 2025). Sejalan dengan kondisi tersebut, OJK menginisiasi revisi POJK No. 51/POJK.03/2017 untuk mendorong penerapan standar pelaporan keberlanjutan yang lebih seragam sehingga kualitas dan keterbandingan informasi yang diungkapkan perusahaan dapat ditingkatkan (OJK, 2026; Pratiwi, 2026).

Adanya variasi kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan tersebut dapat dijelaskan melalui *stakeholder theory*. Teori ini menempatkan perusahaan pada

sudut pandang yang cukup luas, sebagai entitas yang bertanggung jawab kepada pemegang saham, masyarakat, pemerintah, hingga ekosistem yang ada di sekitarnya (Hörisch *et al.*, 2020). Dalam perspektif *stakeholder theory*, laporan keberlanjutan merupakan sarana komunikasi strategis perusahaan untuk menanggapi tekanan dan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban regulatif, tetapi juga oleh karakteristik internal perusahaan serta strategi komunikasi yang digunakan perusahaan dalam menjangkau para pemangku kepentingannya.

Perlunya strategi dalam pengungkapan laporan keberlanjutan mengindikasikan bahwa kepatuhan regulatif saja belum cukup untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga media sosial berpotensi menjadi salah satu sarana pendukung pengungkapan informasi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2025) mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 229 juta orang dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66%, sedangkan survei BEI menunjukkan bahwa 70,10% responden menjadikan media sosial sebagai sumber informasi mengenai pasar modal Indonesia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2025; Indonesia Stock Exchange, 2022).

Sejalan dengan itu, Anisah *et al.* (2024) dan Asmussen *et al.* (2013) menjelaskan bahwa pengungkapan informasi melalui media sosial mampu meningkatkan citra positif perusahaan karena memiliki jangkauan penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat. Meskipun penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih terbatas,

berbagai penelitian terdahulu membuktikan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan perusahaan, baik pengungkapan keuangan maupun nonkeuangan (Lei *et al.*, 2019; Li *et al.*, 2025; F. W. P. A. Putri & Widyaningdyah, 2023; Sun *et al.*, 2022). Dengan demikian, media sosial berpotensi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan.

Xing *et al.* (2024) dan Putri *et al.* (2024) membuktikan bahwa implementasi operasional bisnis berkelanjutan dapat memberikan nilai tambah bagi pemasok maupun produsen. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, baik pada negara berkembang yang sedang mengalami transisi regulasi maupun negara maju yang telah memiliki regulasi yang mapan (Ali *et al.*, 2025; Lee *et al.*, 2025; Rabaya & Saleh, 2022; Wu *et al.*, 2025). Namun, Cantero-Saiz *et al.* (2025), Fan dan Lin (2025), Hidayah dan Raihan (2024), serta Saepudin *et al.* (2021) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai perusahaan maupun tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi belum tentu diikuti oleh tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih tinggi, meskipun secara teoritis perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk meningkatkan keterbukaan informasi keberlanjutan.

Selain profitabilitas, karakteristik struktural perusahaan, seperti ukuran perusahaan, turut memengaruhi kapasitas dan strategi perusahaan dalam

menjalankan aktivitas bisnis serta pengungkapan informasi (Saif-Alyousfi *et al.*, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan karena perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam merespons isu sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Fan & Lin, 2025; Gantyowati & Agustine, 2017; Hidayah & Raihan, 2024; Mukhibad *et al.*, 2024; Saepudin *et al.*, 2021; Shygun & Bezverkhyi, 2026). Namun, Andreas dan Chang (2025) serta Lina (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena pengungkapan laporan keberlanjutan serta hasil penelitian terdahulu yang belum mencakup seluruh sektor usaha dan belum berfokus pada tahun tertentu, penelitian ini menguji kembali pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan serta menambahkan variabel penggunaan media sosial yang semakin banyak dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi perusahaan dengan pemangku kepentingan. Pemilihan periode penelitian tahun 2024 didasarkan pada fase transisi penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan melalui *Sustainable Finance Roadmap* Tahap II (2021–2025), implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017, serta meningkatnya perhatian investor global terhadap instrumen berbasis ESG (Refadebby, 2025).

Meskipun data Bloomberg ESG Disclosure Score menunjukkan bahwa sektor energi dan pertambangan cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi akibat tekanan regulasi dan investor, penelitian ini mencakup seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2024 untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini menguji pengaruh penggunaan media sosial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada periode transisi penerapan kebijakan keberlanjutan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan serta menjadi referensi bagi regulator dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keberlanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Selain kondisi geografis dan klimatologi Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penurunan intensitas bencana yang terjadi di Indonesia pada 2024 didukung oleh adanya intervensi program pemerintah serta kepedulian masyarakat dalam mitigasi bencana. Namun demikian, masih ditemukan indikasi aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko ekologis, sebagaimana dugaan Satgas PKH terhadap 12 perusahaan yang aktivitasnya dikaitkan dengan bencana lingkungan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada penghujung 2025 (arya.dwiangga@kompas.com, 2026). Pertumbuhan ekonomi dan kegiatan industri harus dijaga agar tidak bergesekan dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial. Oleh karena itu OJK mewajibkan

perusahaan yang terdaftar di BEI untuk menyusun laporan keberlanjutan. Walaupun demikian, meski tingkat kepatuhan pelaporan telah mencapai 94% (idxchannel, 2025), beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan masih cenderung bersifat *overclaim*, kurang komprehensif dan dilakukan sebatas untuk mematuhi regulasi serta membangun citra di depan para *stakeholder* (Aptasari *et al.*, 2024; Cahyaningrum & Violita, 2023).

Fenomena tersebut sejalan dengan *stakeholder theory* yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pengelolaan aktivitas bisnis dan laba perusahaan dengan hubungan antar pihak berkepentingan (Hörisch *et al.*, 2020). Dalam kerangka teori ini, laporan keberlanjutan dipandang sebagai respon atas tekanan *stakeholder*, yang pengungkapannya dipengaruhi oleh penggunaan media sosial sebagai media komunikasi, serta karakteristik perusahaan seperti profitabilitas dan Ukuran Perusahaan sebagai tolak ukur tingginya tekanan publik dan kapasitas perusahaan dalam memenuhi ekspektasi pengungkapan (Majdi *et al.*, 2023; Nu *et al.*, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dikaji, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan media sosial berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2024?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh positif penggunaan media sosial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2024.
2. Pengaruh positif profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2024.
3. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang telah disampaikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris terkait faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, ditambah dengan adanya variabel penggunaan media sosial pada perusahaan lintas sektor yang terdaftar di BEI tahun 2024. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih relevan dengan dinamika digital dan regulasi terkini.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai praktik pengungkapan laporan keberlanjutan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses penelitian ini juga diharapkan meningkatkan kepekaan terhadap kesenjangan antara komitmen keberlanjutan yang diungkapkan perusahaan dan kualitas implementasinya dalam praktik bisnis.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan regulator dalam mengevaluasi efektivitas regulasi terkait pelaporan keberlanjutan. Khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas dan kedalaman pengungkapan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat mendukung perumusan kebijakan yang tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, tetapi juga transparansi atas praktik keberlanjutan perusahaan.

4. Bagi Perusahaan dan Masyarakat

Bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, tidak hanya sebagai sarana pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan, termasuk melalui media sosial. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan

serta penilaian kinerja perusahaan, baik dalam aspek finansial maupun nonfinansial.

1.4 Sistematika penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lima bab, di mana sistematika penulisan berisi pemaparan singkat untuk masing-masing bab. Pembuatan sistematika penulisan bertujuan untuk menguatkan alur penelitian serta memastikan penulisan penelitian berjalan secara sistematis. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

A. Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang, fenomena, serta perbedaan yang mendasari dilakukannya penelitian, meliputi penelaahan urgensi serta pematangan pemikiran dalam penelitian. Selain membahas rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan adanya penelitian, kegunaan penelitian bagi berbagai pihak dan sistematika penulisan penelitian yang memaparkan gambaran singkat setiap bab dalam penelitian ini.

B. Bab II Tinjauan Pustaka

Menyajikan landasan teori yang digunakan sebagai tiang pemikiran dalam penelitian, menjadi dasar interpretasi dan pengembangan berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian. Setiap variabel yang dijadikan objek penelitian juga dijelaskan dalam bab ini, definisi dan hal terkait yang menjadi acuan dalam proses penelitian. Untuk memaparkan perbedaan penelitian (*gap*) dengan penelitian yang pernah dilakukan, disajikan Tabel yang memaparkan penelitian terkait berikut

dengan hasilnya. Pada bagian akhir bab ini diberikan kerangka pemikiran beserta dengan hipotesis penelitian yang menggambarkan arah dari hasil penelitian.

C. Bab III Metode Penelitian

Merupakan bab yang menjabarkan metodologi dalam penelitian, terkait dengan langkah serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran terkait hal-hal dalam penelitian ini, disajikan definisi operasional variabel dan deskripsi variabel penelitian. Populasi, ukuran sampel, metode pengambilan sampel, lokasi, serta hal krusial lainnya dijelaskan secara gamblang dalam bab ini. Hal-hal terkait analisis data, baik teknik pengumpulan maupun pengolahan, juga dijelaskan untuk memperjelas proses penyelesaian masalah serta pencapaian tujuan dalam penelitian ini.

D. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Sebagai bagian yang mengandung hasil dari penelitian, bab hasil dan pembahasan ini mencakup berbagai hasil analisis data, interpretasi peneliti, argumen peneliti berdasarkan objek penelitian, demografi penelitian, serta metode pengolahan data penelitian. Bab ini menjelaskan pemikiran peneliti berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

E. Bab V Penutup

Pada bagian terakhir yaitu bab lima, terdapat kesimpulan berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, seluruh landasan teori, metode, serta data penelitian, juga hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Disampaikan pula hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Lalu peneliti memberikan saran serta

rekomendasi perbaikan bagi peneliti mendatang yang akan melaksanakan penelitian dengan topik serupa.